

PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

by Lppm 2022

Submission date: 20-Jul-2022 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872920679

File name: 29._Pengaruh_PAD,_DAU,_DAK.pdf (345.89K)

Word count: 5109

Character count: 32875

12 PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Metta Maheni¹, Maryono²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sukubank
e-mail: ¹ metta.maheni.99@gmail.com, ² maryono@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah dengan 3 tahun pengamatan. Sehingga jumlah sampel yang diteliti sebanyak 105.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2019 dan BPS Provinsi Jawa Tengah. Hubungan dan pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang pemerintahan daerah untuk mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai kewenangan dari otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah berupaya untuk memajukan dan memaksimalkan semua kemampuan daerah yang bersangkutan dengan penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tersebut ada dalam bentuk desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas desentralisasi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan lebih baik, teratur, dan kondusif sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sependapat dengan Kusuma (2016), Ivan dan Karmini (2016), Manek dan Badrudin (2016). Pemerintah pusat juga menyerahkan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sependapat dengan Sumartini dan Yasa (2015), Irvan dan Karmini (2016), Lisandri, dkk (2017), Wiraswasta, dkk (2018), Ningsih dan Noviaty (2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sependapat dengan penelitian dari Dewi dan Suputra (2017).

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Belanja modal dalam hal ini digunakan sebagai variabel intervening. Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya harus bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal

menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah secara keseluruhan obyek atau subyek yang akan diteliti dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sampel merupakan beberapa atau sebagian jumlah dari populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan penelitian ini mengambil semua populasi dijadikan sampel. Sampel penelitian sebanyak 35 terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2017-2019 serta Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau yang menjadi akibat oleh adanya variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Serta variabel intervening dalam penelitian ini adalah belanja modal.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, uji t, serta *path analysis*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	179224408698	2066333418588	396764514586.43	277878152408.663
DAU	105	440041244000	1437036239000	971726589550.29	248994624943.497
DAK	105	56452309000	477533051326	292596929155.52	103901739666.504
BM	105	113622507976	1275359088966	398901631723.16	181910918413.975
PE	105	.0230	.0700	.054714	.0077295
Valid N (listwise)	105				

Hasil analisis deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 179.224.408.698 rupiah yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2018, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 2.066.333.418.588 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2019, memiliki nilai rata-rata sebesar 396.764.514.586,43 rupiah dengan deviasi sebesar 277.878.152.408,663 rupiah.

2. Berdasarkan data Dana Alokasi Umum, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 440.041.244.000 rupiah yaitu Kota Magelang pada tahun 2017, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.437.036.239.000 rupiah yaitu Kabupaten Banyumas pada tahun 2019, memiliki nilai rata-rata sebesar 971.726.589.550,29 rupiah dengan deviasi sebesar 248.994.624.943,497 rupiah.
3. Berdasarkan data Dana Alokasi Khusus, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 56.452.309.000 rupiah yaitu Kabupaten Magelang pada tahun 2017, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 477.533.051.326 rupiah yaitu Kabupaten Banyumas pada tahun 2018, memiliki nilai rata-rata sebesar 292.596.929.155,52 rupiah dengan deviasi sebesar 103.901.739.666,504 rupiah.
4. Berdasarkan data Belanja Modal dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 113.622.507.976 rupiah yaitu Kota Tegal pada tahun 2018, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.275.359.088.966 rupiah yaitu Kota Semarang pada tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 398.901.631.723,16 rupiah dengan deviasi sebesar 181.910.918.413,975 rupiah.
5. Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 0,0230 yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2019, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 0,0700 yaitu Kabupaten Rembang pada tahun 2017, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,054714 dengan deviasi sebesar 0,0077295 .

Tabel 2. Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	105	.153	.236	-.762	.467
Valid N (listwise)	105				

$$Z_{skewness} = \frac{Skewness}{\sqrt{\frac{6}{N}}}$$

$$Z_{skewness} = \frac{0,153}{\sqrt{\frac{6}{105}}} = 0,640$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{Kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{N}}}$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{-0,762}{\sqrt{\frac{24}{105}}} = -1,594$$

Dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 105 data. Hasil tersebut diperoleh nilai skewness sebesar 0,640 < 1,96 dan nilai kurtosis sebesar - 1,594 < 1,96 yaitu dengan signifikan pada 0,05 dapat disimpulkan bahwa data yang diolah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	25464185771.505	37530812330.518			
PAD	.494	.041	.754	.625	1.600
DAU	.105	.082	.144	.195	5.117
DAK	.259	.181	.148	.232	4.317

a. Dependent Variable: BM

Jadi dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari gejala multikolinearitas yaitu nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.079

a. Predictors: (Constant), BM,

DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PE

Nilai hitung Durbin-Watson sebesar 2,079 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,74106 dan kurang dari (4-du) yaitu 4 dikurangi 1,74106 menjadi 2,25894. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari uji autokorelasi adalah tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. **5**i Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.134	.744		64.691	.000
PAD	1.167E-12	.000	.174	1.429	.156
DAU	1.295E-12	.000	.173	.794	.429
DAK	-1.214E-12	.000	-.068	-.338	.736

a. Dependent Variable: LNU2I_RES1

Nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel **5** Persamaan Satu
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25464185771.505	37530812330.518		.678	.499
PAD	.494	.041	.754	11.975	.000
DAU	.105	.082	.144	1.276	.205
DAK	.259	.181	.148	1.428	.156

a. Dependent Variable: BM

Tabel **5**. Persamaan Dua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.056	.003		18.723	.000
PAD	1.605E-14	.000	.577	3.136	.002
DAU	9.155E-16	.000	.029	.138	.890
DAK	-5.490E-15	.000	-.074	-.376	.708
BM	-1.789E-14	.000	-.421	-2.252	.026

a. Dependent Variable: PE

$$BM = 25.464.185.771.505 + 0,754PAD + 0,144DAU + 0,148DAK + e1$$

$$PE = 0,056 + 0,577PAD + 0,029DAU - 0,074DAK - 0,421BM + e2$$

Uji Kelayakan Model

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 ^a	.750	.742	92332565162.819

- a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU
- b. Dependent Variable: BM

Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,742 yang berarti variabilitas variabel dependen (Belanja Modal) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (PAD, DAU, DAK) sebesar 74,2% sedangkan sisanya 25,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.355 ^a	.126	.091	.0073679

- a. Predictors: (Constant), BM, DAK, PAD, DAU
- b. Dependent Variable: PE

Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,091 yang berarti variabilitas variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (PAD, DAU, DAK, BM) sebesar 9,1% sedangkan sisanya 90,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Tabel 9. Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2580468991230263000000000.000	3	860156330410087600000000.000	100.895	.000 ^b
Residual	861055561544174000000000.000	101	8525302589546277000000.000		
Total	3441524552774437000000000.000	104			

- a. Dependent Variable: BM
- b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Nilai F-hitung sebesar 100,895 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap BM adalah model yang layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 5. Persamaan Satu
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25464185771.505	37530812330.518		.678	.499
PAD	.494	.041	.754	11.975	.000
DAU	.105	.082	.144	1.276	.205
DAK	.259	.181	.148	1.428	.156

- a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan hasil output diatas menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Nilai t hitung sebesar 11,975 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Nilai t hitung sebesar 1,276 dengan signifikan sebesar 0,205. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,205 > 0,05, sehingga H2 ditolak yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Nilai t hitung sebesar 1,428 dengan signifikan sebesar 0,156. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,156 > 0,05, sehingga H3 ditolak yang artinya bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 5 . Persamaan Dua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.056	.003		18.723	.000
PAD	1.605E-14	.000	.577	3.136	.002
DAU	9.155E-16	.000	.029	.138	.890
DAK	-5.490E-15	.000	-.074	-.376	.708
BM	-1.789E-14	.000	-.421	-2.252	.026

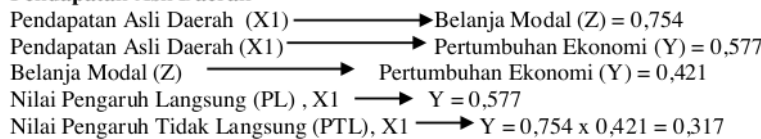
a. Dependent Variable: PE

Berdasarkan hasil output diatas menunjukkan bahwa :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 Nilai t hitung sebesar 3,136 dengan signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, sehingga H4 diterima yang artinya bahwa **Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 Nilai t hitung sebesar 0,138 dengan signifikan sebesar 0,890. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,890 > 0,05$, sehingga H5 ditolak yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 Nilai t hitung sebesar - 0,376 dengan signifikan sebesar 0,708. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,708 > 0,05$, sehingga H6 ditolak yang artinya bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 Nilai t hitung sebesar - 2,252 dengan signifikan sebesar 0,026. Nilai signifikan untuk variabel Belanja Modal menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,026 < 0,05$, sehingga H7 ditolak yang artinya bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

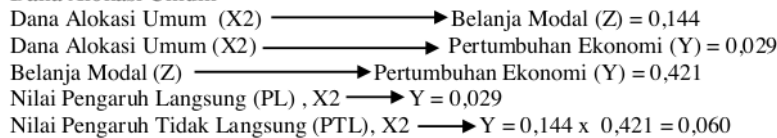
Metode Analisis Jalur (Path Analysis)

Pendapatan Asli Daerah



Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung (PTL 0,317 < PL 0,577). Sehingga, Belanja Modal tidak mampu mengintervening (memediasi) Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Alokasi Umum



Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung (PTL 0,060 > PL 0,029). Sehingga, Belanja Modal mampu mengintervening (memediasi) Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Alokasi Khusus



Dana Alokasi Khusus (X3) \longrightarrow Pertumbuhan Ekonomi (Y) = 0,074
 Belanja Modal (Z) \longrightarrow Pertumbuhan Ekonomi (Y) = 0,421
 Nilai Pengaruh Langsung (PL), X3 \longrightarrow Y = 0,074
 Nilai Pengaruh Tidak Langsung (PTL), X3 \longrightarrow Y = 0,148 x 0,421 = 0,062

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung (PTL 0,062 < PL 0,074). Sehingga, Belanja Modal tidak mampu mengintervening (memediasi) Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui alokasi anggaran belanja modal karena masyarakat telah menjalankan kewajibannya atas pembayaran pajak daerah, retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat, bahwa kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar dan sangat besar peranannya terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Tahar (2015), Kusuma (2016), Irvan dan Karmini (2016), Wiraswasta, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana alokasi umum dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini karena dana alokasi umum tidak dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya dialokasikan untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Yasa (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai prioritas nasional yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memaksimalkan penggunaan dana alokasi khusus untuk belanja modal. Meskipun untuk pengalokasian dana alokasi khusus cenderung meningkatkan asset pemerintah daerah, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi sebab karena setiap tahun alokasi dana alokasi khusus cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi, sehingga pengaruh terhadap alokasi belanja modal cenderung sedikit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Otonomi daerah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri pendapatannya termasuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar dan sangat besar peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015), Irvan dan Karmini (2016), Manek dan Badrudin (2016), Fahma dan Nuraini (2017), Kusumawati dan Wiksuana (2018), Wiraswasta, dkk (2018), Ningsih dan Noviaty (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai program khusus di daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dengan maksud untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi khusus untuk memberikan pelayanan kepada publik sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Badrudin (2016), Ermita, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika belanja modal meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan tetap rendah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih belum merata dan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Pemerintah daerah memiliki kebijakan-kebijakan dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah di daerahnya sebagai tanggungjawab untuk mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan pendapatan yang bersumber dari daerah dan dipungut sesuai ketentuan peraturan daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan asli daerah ke dalam pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah yang telah dialokasikan ke dalam belanja modal untuk tujuan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Tahar (2015), Kusuma (2016), Irvan dan Karmini (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan masih sangat bergantung dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat, salah satunya adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja daerah dalam rangka desentralisasi.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur akan menentukan jumlah alokasi belanja modal dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pemberian dana alokasi umum kepada masing-masing daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pemberian dana alokasi umum dapat menciptakan nilai tambah diberbagai sektor sehingga memperkukuh pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Yasa (2015), Lisandri, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

Pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan Dana Alokasi Khusus antara lain untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik layanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah.

Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi khusus yang direalisasikan melalui belanja modal untuk memberikan pelayanan kepada publik sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa dan lain-lain sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan dan Karmini (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
7. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
8. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja modal.
9. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja modal.
10. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui belanja modal.

Keterbatasan

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya :

1. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci mengenai besar alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.
2. Penelitian menggunakan data sekunder sehingga analisis data sangat bergantung pada hasil publikasi data (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
3. Penelitian ini memerlukan waktu yang relatif lama karena adanya pandemi Covid-19 sehingga publikasi untuk Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 mengalami kemunduran dan peneliti tidak mendapatkan data secara langsung di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, karena hanya dapat melakukan permintaan data secara online melalui website serta e-mail.

6. SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel penelitian. Seperti Kabupaten/Kota di Jawa agar mampu menjelaskan mengenai Belanja Modal secara rinci.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode penelitian tertentu misal 5 tahun, sehingga dapat lebih jelas dalam menggambarkan keterkaitan antara variabel independen terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang lebih bervariasi dan lengkap, baik dalam bentuk ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti Dana Bagi Hasil, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifiyadi, T. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Pusat Data Depkominfo.
- [2] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.
- [3] Dewi, N. R., & Suputra, I. D. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18, No.3*, 1745-1773.
- [4] Ernita, D., Putri, O. H., & Sari, I. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jambi. *Jurnal AKRAB JUARA, Vol.5, No.1*, 200-216.
- [5] Fahma, A., & Nuraini, I. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1*, 163-175.
- [6] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] Halim, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud, Vol.3, No.5*, 338-362.

- [11] Kusuma, M. W. (2016). Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *JRAMB*, Vol.2, No.1, 105-118.
- [12] Kusumawati, L., & Wiksuana, I. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.7, No.5, 2592-2620.
- [13] Lisandri, Rizani, F., & Syam, A. (2017). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD*, Vol.7, No.2, 111-122.
- [14] Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, Vol. 17, No.2, 81-98.
- [15] Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Journal of Economics and Business*, 91-95.
- [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Tentang Belanja Modal.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [19] Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Akrual Jurnal Akuntansi*, Vol.7, No.1, 1-17.
- [20] Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah*. Malang: Dioma.
- [21] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [23] Sumartini, & Yasa. (2015). Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol.4, No.4, 258-271.
- [24] Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I.Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, Vol.11, No.2, 118-136.
- [25] Todaro, M. P. (2004). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
- [28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- [29] Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2, 170-180.

PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
2	www.jrmsi.com Internet Source	2%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
4	vdocuments.site Internet Source	2%
5	mohe.gov.sy Internet Source	2%
6	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	1%
7	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
8	www.sarjanaku.com Internet Source	1%
9	eprints.mdp.ac.id Internet Source	1%

10	pattiro.org Internet Source	1 %
11	komunitasgurupkn.blogspot.com Internet Source	1 %
12	dokumen.tips Internet Source	1 %
13	repository.unri.ac.id Internet Source	1 %
14	www.tatanusa.co.id Internet Source	1 %
15	library.um.ac.id Internet Source	1 %
16	fr.slideshare.net Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On